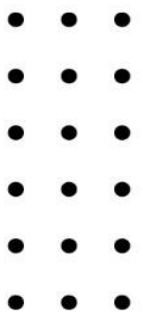




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LKIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah



**TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. LKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan secara baik dan benar (good governance), sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga menuntut kami untuk bekerja lebih keras dan fokus dari periode sebelumnya, terutama dalam menghadapi kendala dan masalah yang selalu dinamis setiap saat.

Dalam LKIP Tahun 2023 ini disampaikan tentang RENSTRA dan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2023, yang di dalamnya diuraikan tentang:

1. Arah kebijakan, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Tujuan, sasaran strategis dan indikator organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran; dan
3. Evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja serta tingkat keberhasilan kinerja.

Dengan uraian-uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Februari 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP 197010191999032004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Fungsional Umum pada Sub Bagian PDE	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum dan Potensi Kelautan Perikanan	1
1.3 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.....	4
1.4 Jumlah Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan	7
1.5 Sumber Daya Aset.....	8
1.6 Isu-Isu Strategis.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 - 2023.....	10
a. Visi dan Misi	10
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	13
c. Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.2 Program/ Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	20
2.4 Perjanjian Kinerja	20
a. Perjanjian Kinerja Utama	21
b. Perjanjian Kinerja Program (outcome).....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
a. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
b. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja.....	25
c. Pengukuran Indikator Kinerja.....	25
d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
3.2 Realisasi Anggaran	53
a. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023	53
b. Realisasi Pendapatan Tahun 2023	55
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menjabarkan tugas dan fungsi kewenangan pengelolaan bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis, yang dalam hal ini telah dirumuskan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA 2018 – 2023).

Tujuan dari pembangunan Kelautan dan Perikanan jangka 5 (lima) Tahunan (2018 – 2023) adalah MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL. Berdasarkan tujuan di atas pada Tahun 2023 ditetapkan sasaran strategis Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabaran tujuan secara kuantitatif, yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan target indikator kinerja Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian sebesar 2,78%;
2. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dengan target indikator kinerja Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah sebesar 1%;
3. Meningkatnya status pangan perikanan dengan target indikator kinerja Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan sebesar 54 kg/kapita/tahun;
4. Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan dengan target indikator kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan senilai 94 dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan senilai 94;
5. Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan dengan target indikator kinerja Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate sejumlah 12 jenis produk olahan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023 mengelola anggaran yang difasilitasi dari APBD sebesar **Rp 53.059.859.128,- (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp 51.579.537.247,- dengan realisasi keuangan TA. 2023 sebesar Rp 46.523.985.726,- (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau mencapai persentase 90,20%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengisyaratkan bahwa Kepala OPD menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Akuntabilitas capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang Tahun 2023 disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan sarana keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintahan dalam mengkomunikasikan kinerja penyelenggaraan pembangunan, sekaligus alat penilaian dan pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih yang bertujuan untuk:

- Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program kegiatan dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi;
- Pengambilan keputusan kearah perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku;
- Perbaikan dalam perencanaan demi terwujudnya visi dan misi dari organisasi.

1.2. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI KELAUTAN PERIKANAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan $\pm 47.349,9 \text{ km}^2$ (19,14%) dan memiliki lautan dengan luas $\pm 200.000 \text{ km}^2$ dengan panjang garis pantai 5.700 km. Provinsi ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Kekayaan bahari seharusnya mampu menjadi penggerak perekonomian dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di $8^\circ - 12^\circ \text{ LS}$ dan $118^\circ - 125^\circ \text{ BT}$ dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 609 buah terdiri atas 432 pulau bernama dan 44 pulau yang berpenghuni. Terdapat 808 desa pantai dengan jumlah penduduk di daerah pesisir sebanyak $\pm 1.300.000$ jiwa. Hasil perhitungan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan angka 55,61 kg/kapita/tahun. Kondisi ini didukung oleh pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan serta kondisi potensi yang ada.

Upaya untuk membangun dinamika pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan didukung dengan peluang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang terdistribusi pada tiga

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang masuk dalam wilayah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing WPP-NRI 573, WPP-NRI 713, WPP-NRI 714 dan berbatasan dengan wilayah negara Timor Leste dan Australia yang secara keseluruhan pada ketiga WPP tersebut Jumlah Tangkapan yang Dibolehkan (JTB) sebesar 393.360 ton/tahun dengan nilai pemanfaatan sebesar 191.000 ton/tahun (48,55%).

Tabel 1.1 Potensi Sumberdaya Ikan pada 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan

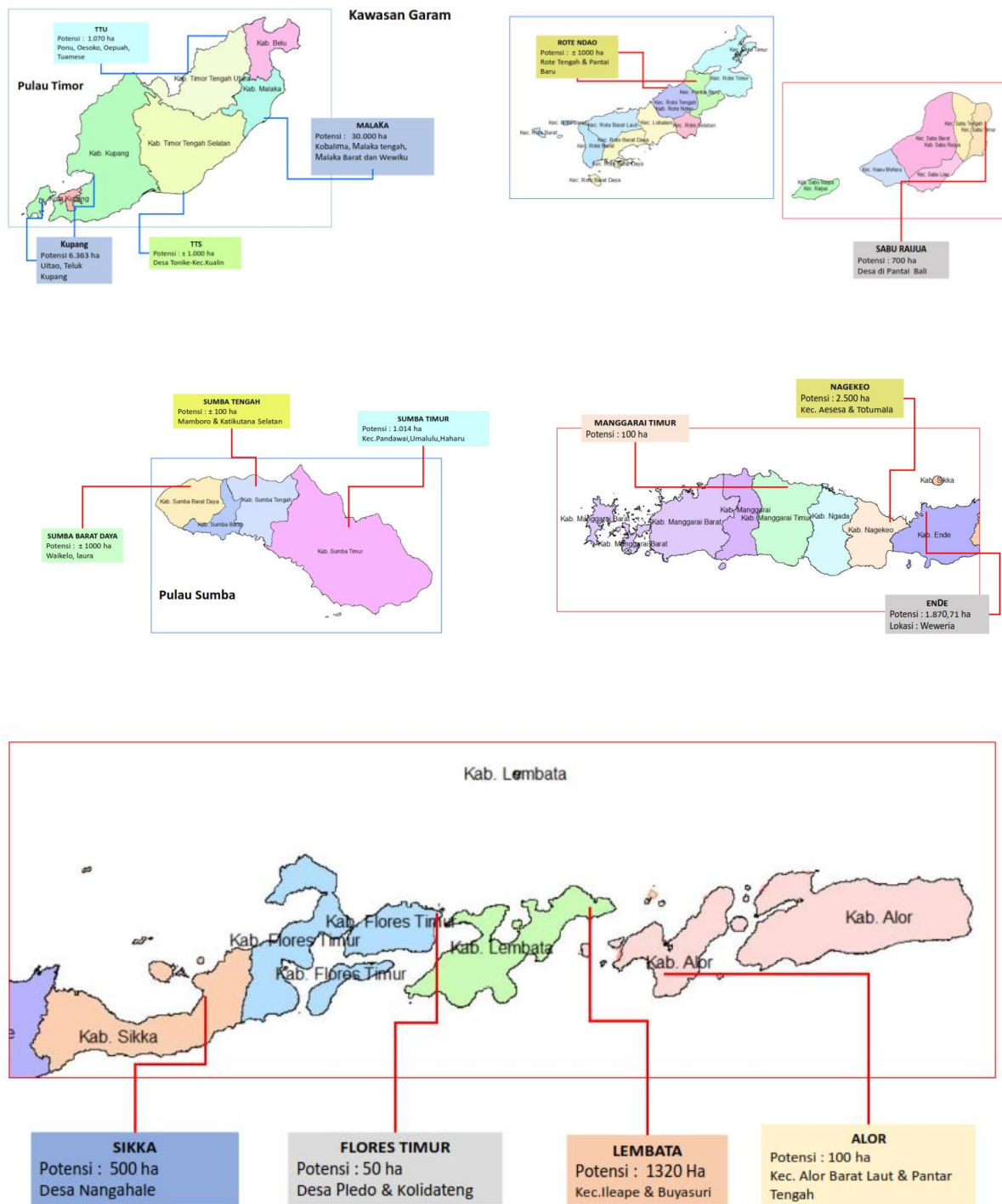
No	Jenis Ikan	Potensi Sumber Daya Ikan (Ton)		
		WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714
1	Ikan Pelagis Kecil	630.521	208.414	165.944
2	Ikan Pelagis Besar	586.128	645.058	304.293
3	Ikan Demersal	7.902	252.869	98.010
4	Ikan Karang	22.045	19.856	145.530
5	Udang Penaeid	7.340	30.404	3.180
6	Lobster	970	927	724
7	Kepiting	526	4.347	1.145
8	Rajungan	3.913	5.463	1.669
9	Cumi-Cumi	8.195	10.519	68.444
Total				

Sumber: KepMen KP Nomor 50 Tahun 2017

Selain potensi perikanan tangkap, perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk pengembangan perikanan budidaya, sesuai dengan lingkungan strategis dan potensi sumber daya lahan yang tersedia. Luas lahan budidaya laut yang tersedia mencapai 53.727 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 22,6% atau seluas 12.150 Ha. Potensi budidaya air payau seluas 35.455 Ha dengan tingkat pemanfaatan sebesar 4,3% atau seluas 1.510 Ha. Sedangkan luas lahan untuk budidaya air tawar mencapai 51.870 Ha tetapi tingkat pemanfaatan baru mencapai 1,7% atau seluas 910 Ha.

Potensi target konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi terumbu karang, lamun, mangrove, mamalia laut, ikan ekonomis penting, penyu dan hiu tikus. Persentase zona inti kawasan melindungi target konservasi sebesar 18%. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 4 kawasan yaitu Taman Perairan Kepulauan Alor dan Sekitarnya, KKPD Flores Timur, KKPD Sikka, KKPD Lembata.

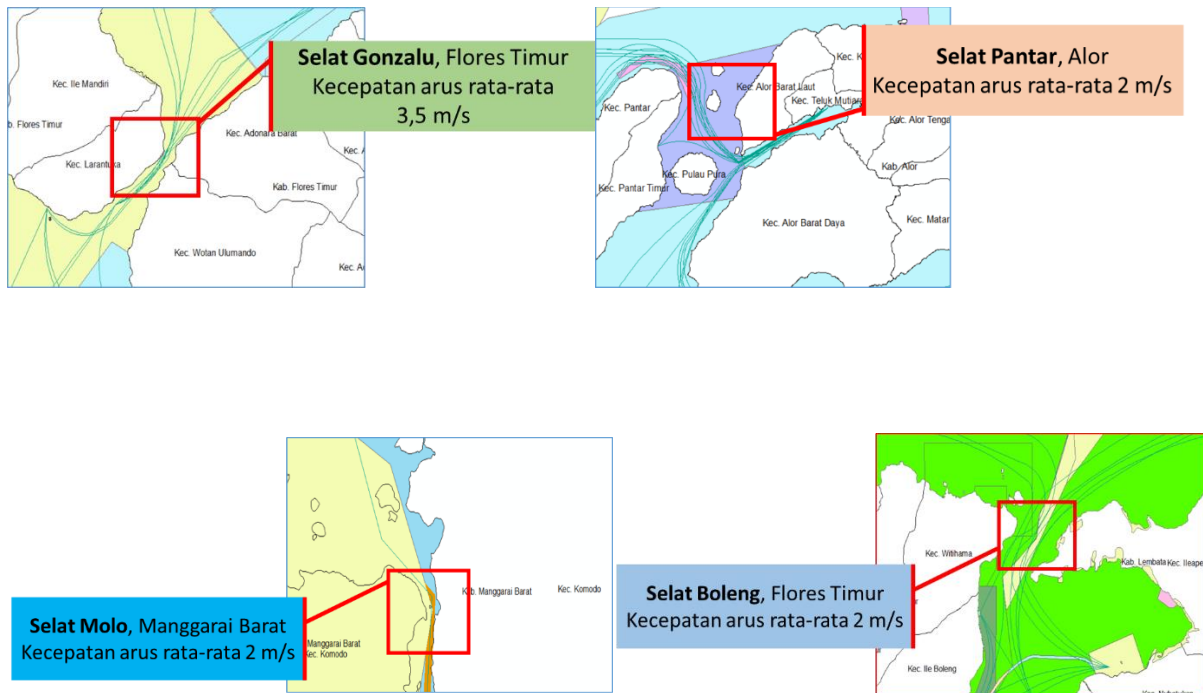
Potensi lainnya yang dapat dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah industri garam. Potensi kawasan garam yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota tergambar dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Potensi Kawasan Garam di wilayah Nusa Tenggara Timur

Salah satu kebijakan dalam pembangunan sektor kelautan adalah pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan peningkatan pemakaian EBT diarahkan untuk memanfaatkan potensi laut sebagai sumber energi utama. Perairan NTT memiliki potensi EBT yang bersumber dari 3 (tiga) sumber energi utama yaitu arus laut, gelombang laut dan temperatur laut. Lokasi potensial bagi

pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di NTT adalah Selat Pantar, Selat Gonzalu, Selat Boleng dan Selat Molo.



Gambar 1.2 Potensi Energi Baru Terbarukan di Nusa Tenggara Timur

1.3. SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ialah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, DKP Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya;
 2. Bidang Perikanan Tangkap;
 3. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD; dan
- f. Cabang Dinas.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di wilayah kerjanya, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta konservasi perairan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta konservasi perairan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerjanya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta konservasi perairan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerjanya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari:

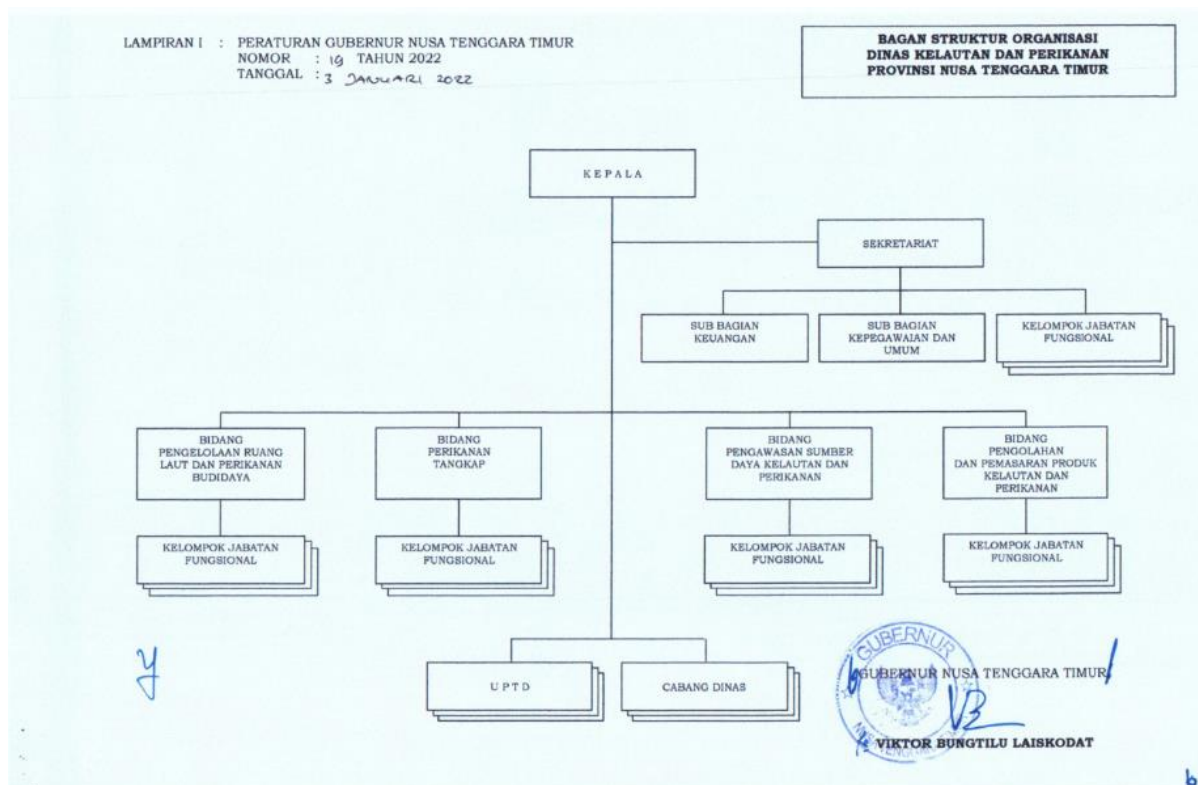
- a. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua di Kupang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelas A;

- b. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka di Atambua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kelas A;
- c. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelas A;
- d. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka di Larantuka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelas A;
- e. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelas A;
- f. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelas A;
- g. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waingapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelas A.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional/kegiatan penunjang tertentu di bidang kepelabuhanan perikanan, budidaya ikan sentra dan budidaya benih ikan pantai, terdiri dari:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tenau, Kupang;
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba;
- c. Pelabuhan Perikanan (PP) Waingapu;
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati;
- e. Pelabuhan Perikanan (PP) Hukung;
- f. Pelabuhan Perikanan (PP) Tulandale;
- g. Balai Benih Ikan Sentra (BBIS) Noekele;
- h. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tablolong.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tergambar dibawah ini.



1.4. JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung oleh 136 PNS yang tersebar pada Kantor Dinas dan 7 Cabang Dinas dengan rincian jumlah pegawai sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S3 (Doktor)	-	1	1
2.	S2 (Pasca Sarjana)	7	5	12
3.	S1 (Sarjana/Diploma-IV)	50	33	83
4.	Sarmud/Diploma III	3	2	5
5.	SLTA/Sederajat	24	5	29
6.	SMP/Sederajat	6	-	6
7.	SD/SR	2	-	2
TOTAL		92	46	138

1.5. SUMBER DAYA ASET

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dalam waktu tahun 2013 – 2023 telah memiliki aset-aset sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 618.487 m² yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota dengan nilai sebesar Rp 86.652.207.019,31,-;
- b. Gedung dan Bangunan sejumlah 135 unit dengan nilai sebesar Rp 35.378.812.532,-;
- c. Kendaraan roda 6 berjumlah 1 unit;
- d. Kendaraan roda 4 berjumlah 16 unit dengan rincian 9 unit kendaraan di Kantor Dinas dan 7 unit di masing-masing Cabang Dinas;
- e. Kendaraan roda 3 berjumlah 3 unit;
- f. Kendaraan roda 2 berjumlah 58 unit yang tersebar di Kantor Dinas sejumlah 32 unit dan sisanya di Cabang Dinas.

1.6. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness and Growth). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Tabel 1.3 Analisis USG Permasalahan Utama Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Permasalahan	Nilai Skala Bobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
1	Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir	5	5	5	15
2	Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya ikan	4	4	5	13
3	Kerusakan wilayah perairan	4	4	5	13
4	Belum optimalnya pemanfaatan perairan untuk budidaya rumput laut	4	5	4	13
5	Tingginya angka stunting di NTT	5	5	5	15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018-2023

a. Visi dan Misi

Dalam upaya mencapai kondisi yang ideal sebagaimana termuat pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023. Dokumen ini menjadi instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan secara khusus dan mendukung pembangunan Nusa Tenggara Timur secara umum.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala internasional, nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi serta kebijakan strategis dalam meningkatkan kinerja institusi. Renstra berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah 5 tahunan untuk menjawab isu strategis bidang kelautan dan perikanan yang telah dirumuskan di dalamnya. Renstra dapat juga diartikan sebagai *roadmap* atas semua usulan kegiatan yang dimunculkan tiap tahunnya oleh bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. *Roadmap* berfungsi sebagai justifikasi apakah kegiatan yang diusulkan tiap tahunnya masih sesuai atau sudah menyimpang jauh dari upaya untuk menjawab isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen renstra perangkat daerah.

Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 – 2023 disusun dengan merujuk pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018-2023, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang saling melengkapi.

Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019–2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK

yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, prioritas yang termuat dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, diarahkan untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah slogan **“NTT Bangkit, NTT Sejahtera”**.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT ini disusun dengan tetap merujuk pada Visi, Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah yang tercantum di dalam dokumen RPJMD 2018- 2023. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan tetap mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2018-2023. Visi RPJMD 2018-2023 menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun yang akan datang, yaitu : **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk mencapai **Misi ke-1** yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; yang bermakna melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung misi ini dengan memberikan bantuan/hibah pada masyarakat perikanan berupa sarana penangkapan ikan dan sarana budidaya perikanan sejalan dengan arahan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yang menjadi salah satu sektor penting dalam mensukseskan **Program NTT Bangkit** dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata sebagai penggerak utama. **Misi ke- 2** yakni membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*). Wilayah perairan Provinsi NTT yang luas, memiliki keanekaragaman spesies yang langka serta ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun yang luas dengan ditunjang hamparan pasir putih yang indah merupakan elemen potensial dalam pengembangan pariwisata bahari. Optimalisasi pemanfaatannya dalam konteks pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* akan menjadi penggerak utama (*prime mover*) kemajuan ekonomi NTT.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Analisis Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir	Pemasaran masih didominasi oleh penjualan domestik sehingga harga jual ikan masih relatif rendah	Masih rendahnya investasi (<i>buyer</i>) dibidang ekspor produk perikanan
2	Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya ikan	Masih rendahnya SDM dan belum masuknya teknologi terapan tepat guna di bidang penangkapan dan budidaya ikan	Melakukan pembinaan dan <i>pilot project</i> untuk teknologi tepat guna di bidang penangkapan dan budidaya ikan
3	Kerusakan wilayah perairan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan belum optimalnya upaya pengawasan	Belum optimalnya sosialisasi tentang kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan terbatasnya sarpras pengawasan
4	Belum optimalnya pemanfaatan perairan untuk budidaya rumput laut	Belum terpenuhinya penyediaan bibit unggul rumput laut	Terbatasnya kebun bibit unggul rumput laut yang diperbanyak melalui seleksi varietas dan kultur jaringan
5	Rendahnya angka konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan gizi untuk penanganan stunting di NTT	Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) di kalangan masyarakat NTT	Masih belum terjangkaunya harga ikan dan distribusi ikan di daerah pelosok dan kurangnya sosialisasi GEMARIKAN di Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, adapun yang menjadi permasalahan pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir; masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh nelayan; kerusakan wilayah perairan; belum optimalnya pemanfaatan budidaya rumput laut; dan rendahnya angka konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan gizi untuk penanganan stunting di NTT.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas, adapun tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sebanyak 2 (dua) rumusan:

1. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat; dan
2. Mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari 2 (dua) tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB;
2. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya;
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan;
4. Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing.

Adapun rincian tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Analisis Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat	1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Peningkatan PDRB (%)
	2. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya	Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya
	3. Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (%)
2. Mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat	4. Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Peningkatan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (%)
	5. Tersedianya lingkungan perairan	Berkurangnya Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulated, Unreported Fishing) (%)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	yang bebas IUU Fishing	

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Pembangunan kelautan dan perikanan di Nusa Tenggara Timur akan dipengaruhi faktor sumber daya seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya lainnya, termasuk sarana dan prasarana pendukung.

Pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga akan dipengaruhi oleh faktor politis berupa arahan kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Faktor arahan kebijakan tersebut akan menentukan pola, bentuk dan mekanisme dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat volume produksi/ pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, ketersediaan dukungan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta berbagai aspek lainnya yang terkait.

Penjelasan lebih lanjut tersaji dalam tabel di bawah ini tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2018 – 2023.

Tabel 2.3 Analisis Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran: Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi sumberdaya perikanan dalam rangka peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 1.2. Operasional Pelabuhan Kewenangan Provinsi
2. Restrukturisasi armada penangkapan ikan	2.1. Perijinan perikanan tangkap
3. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.1. Peningkatan produktifitas budidaya rumput laut 3.2. Peningkatan produktifitas budidaya ikan 3.3. Peningkatan Rekomendasi Perizinan Budidaya

Sasaran: Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Penguasaan Teknologi	1.1. Bimbingan Teknis dan Pelatihan kepada Nelayan dan Pembudidaya 1.2. Diversifikasi produk pasca panen 1.3. Penyediaan Asuransi bagi Nelayan dan pembudidaya

Sasaran: Meningkatnya angka konsumsi ikan	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Distribusi dan Pengolahan produk hasil Perikanan tangkap dan Budidaya	1.1. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) 1.2. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 1.3. Pengujian mutu produk hasil perikanan 1.4. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) 1.5. Ijin Usaha Pemasaran dan Pengolahan (SIUP)

Sasaran: Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Menghitung dan memetakan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari	1.1. Daya dukung daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 1.2. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove 1.3. Ijin lokasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil
2. Melakukan penetapan pengelolaan kawasan konservasi	2.1. Pengelolaan kawasan konservasi

Sasaran: Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan guna menurunkan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulated, Unreported Fishing)	1.1. Peningkatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 1.2. Pembinaan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan

2.2. PROGRAM/ KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Kebijakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kebijakan pembangunan dijabarkan kembali pada suatu program yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program	Kegiatan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 3.2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 3.3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3.4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan diatas, maka selanjutnya dijabarkan kedalam masing-masing Sub Kegiatan beserta anggaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Penjabaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.628.009.270
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.484.479.325
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.557.102
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	52.723.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.412.198.523
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.315.237.500
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.310.070.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.167.500
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.012.825
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.012.825
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.240.270
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.335.270
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.098.900
	Penyediaan Bahan/Material	40.508.700
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.838.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.458.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.249.400
	Pengadaan Mebel	90.979.600
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.269.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.935.245.850
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.540.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	899.892.150
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.019.813.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.544.100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.516.900
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.811.200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.216.000
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.347.563.900
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.344.163.900

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU (Rp)
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3.307.965.900
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.198.000
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.400.000
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.400.000
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24.335.071.000
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	202.151.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.130.000
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	24.116.900.000
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	63.616.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.832.158.119
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.130.069
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.130.069
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.827.028.050
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	98.428.050
5.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.314.896.800
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.314.896.800
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU (Rp)
6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	121.838.158
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158

Sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, maka bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi program prioritas yang difasilitasi dana APBN yang terdiri dari 6 (enam) program dekonsentrasi dan 1 (satu) program tugas pembantuan dengan total anggaran sebesar Rp 3.358.544.000,00.

Tabel 2.6 Penjabaran Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Pagu Anggaran Tahun 2023

No.	Kode/ Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	249001 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (01)	296.683.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	296.683.000
2.	249084 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (03)	565.381.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	565.381.000
3.	249085 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (04)	595.827.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	595.827.000
4.	249086 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (05)	293.482.000
	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	293.482.000
5.	249087 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (06)	317.367.000
	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	317.367.000
6.	249088 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (07)	726.804.000
	Program Pengelolaan Ruang Laut	726.804.000
7.	249169 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (TP)	563.000.000

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berisikan program/ kegiatan tahunan dan anggaran pelaksanaan program/ kegiatan tersebut, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana Visi dan Misi Renstra Dinas Tahun 2018-2023. Untuk Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan Dinas ditetapkan capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Menurut PERMENPAN-RB Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, sebagai berikut:

2.4.1. Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Gubernur) dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 2018 - 2023. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis. Untuk Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Penjabaran Indikator Kinerja, Sasaran Strategis, Target dan Formula Indikator Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Indikator
1.	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	2,78%	Sumber data BPS
2.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	1%	$\frac{\text{Total PAD PD}}{\text{Total PAD Provinsi}} \times 100$
3.	Meningkatnya status pangan perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	54	A= Angka SUSENAS B= Angka Konsumsi diluar RT (30%) C= Angka Konsumsi yang tidak tercatat (A+B x 30%) Total AKI= A+B+C
4.	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	94	Sumber data BPS
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	94	Sumber data BPS
5.	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	12	Jumlah Jenis Produk Olahan

2.4.2. Perjanjian Kinerja Program (outcome)

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Unit Kerja Eselon-III dengan target kinerja yang diperjanjikan

adalah Indikator Kinerja Program (*outcome*). Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran strategis.

Tabel 2.8 Penjabaran Indikator Kinerja Outcome Terhadap Sasaran Strategis dan Target Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Kuantitas	%
1.	Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola	676.000 Ha	100
2.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	195.000 ton	7
3.		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2.570.000 ton	20
4.	Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing	Penurunan kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported)	0%	0
5.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan	54 kg/kapita/tahun	8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator berikut:

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan;
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (benefit) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (outcome);
- e. Dampak (impact) menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan dinas.

Cara perhitungan indikator kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan melihat kepada kondisi tertentu. Kondisi tersebut, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pemaknaan dari capaian indikator kinerja dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala dan Kategori Penilaian Capaian Indikator

No.	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1.	>90	Sangat Memuaskan
2.	>80 - 90	Memuaskan
3.	>70 - 80	Sangat Baik
4.	>60 - 70	Baik
5.	>50 - 60	Cukup
6.	>30 - 50	Kurang
7.	0 - 30	Sangat Kurang

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh rata-rata capaian sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Kondisi Awal (2022)
			Target	Capaian	
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah					
1.	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian	%	2,78	4,44**	2,77
Sasaran 2: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah					
2.	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1	0,42	0,55
Sasaran 3: Meningkatnya status pangan perikanan					
3.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	Kg/kapita/tahun	54	55,61**	48,50
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan					
4.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Angka	100	92,46**	100
5.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Angka	100	104,79**	93
Sasaran 5: Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan					
6.	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	Jenis	12	12	12

Keterangan: ** Data Sementara

3.1.3. Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan atau pencapaian yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk:

- Mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan untuk penyelenggaraan manajemen yang baik dan benar;
- Mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan progresivitas akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.3 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja	Kategori
			Target	Realisasi		
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah						
1.	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian	%	2,78	4,44**	159,71	Sangat Memuaskan
Sasaran 2: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah						
2.	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1	0,42	42	Kurang
Sasaran 3: Meningkatnya status pangan perikanan						
3.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	Kg/kapita/tahun	54	55,61**	102,98	Sangat Memuaskan
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan						
4.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Angka	100	92,46**	92,46	Sangat Memuaskan
5.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Angka	100	104,79**	104,79	Sangat Memuaskan
Sasaran 5: Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan						
6.	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	Jenis	12	12	100	Sangat Memuaskan

Keterangan: ** Data Sementara

Penjelasan pencapaian masing-masing sasaran Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Tahun 2023, dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Indikator kinerja : Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor Pertanian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah					
1.	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian	%	2,78	4,44**	159,71

Sub sektor perikanan dan kelautan sampai saat ini tetap memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional maupun regional, baik berupa sumbangan langsung maupun tidak langsung. Sumbangan langsung seperti dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor dan penekanan inflasi. Sumbangan tidak

langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran sektor kelautan dan perikanan dalam melaksanakan koordinasi dan memberikan fasilitasi bagi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengalokasian anggaran yang mendukung indikator kinerja dimaksud dari **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** sebesar Rp. 24.335.071.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.330.152.800,- atau 95,87%. Selain itu, dukungan dari **Program Perikanan Budidaya** dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.989.624.019,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.665.646.350,- atau 90,91%. Pada Tahun 2023 kontribusi sub sektor perikanan dan kelautan terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian sebesar 4,44%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Indikator kinerja : Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 2: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah					
2.	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1	0,42	42

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun realisasinya cenderung fluktuatif. Pendapatan total Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil serta dana transfer lainnya, yang mengindikasikan derajat kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan. Capaian Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 mendukung sebesar 0,42% Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dukungan program terhadap indikator kinerja dimaksud berasal dari **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** sebesar Rp. 24.335.071.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.330.152.800,- atau 95,87%. Selain itu, dukungan dari **Program Perikanan Budidaya** dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.989.624.019,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.665.646.350,- atau 90,91%.

Sasaran 3 : Meningkatnya status pangan perikanan

Indikator kinerja : Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 3: Meningkatnya status pangan perikanan					
3.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	Kg/kapita/tahun	54	55,61**	102,98

Upaya pencapaian target konsumsi ikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus dilakukan secara bertahap, dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat diantaranya melalui kegiatan promosi dan sosialisasi Gemar Makan Ikan untuk menggali kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani dari sumber ikan serta mengupayakan pengadaan bahan pangan ikan melalui peningkatan produksi sendiri dan pengiriman antar pulau. Data sementara untuk Tahun 2023 tercapai sebesar 55,61 kg/kapita/tahun, dimana data tersebut masih menggunakan data SUSENAS Tahun 2022. Dukungan program terhadap indikator kinerja dimaksud berasal dari **Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.838.158,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 49,24%.

Sasaran 4 : Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan

Indikator kinerja : - Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan

- Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan					
4.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Angka	100	92,46**	92,46
5.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Angka	100	104,79**	104,79

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, pelagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil. Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan nelayan/pembudidaya. Data sementara NTN Provinsi NTT senilai 92,46 yang berarti kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, membuat pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Sedangkan NTP Provinsi NTT senilai 104,79 dimana kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga pembudidaya

mengalami impas. Dukungan program terhadap indikator kinerja dimaksud berasal dari **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** sebesar Rp. 24.335.071.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.330.152.800,- atau 95,87%. Selain itu, dukungan dari **Program Perikanan Budidaya** dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.989.624.019,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.665.646.350,- atau 90,91%.

Sasaran 5 : Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan

Indikator kinerja : Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 5: Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan					
6.	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	Jenis	12	12	100

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui salah satu program yang ada dan mendukung pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan dalam bentuk produk loin tuna, tuna beku, ikan kering, nugget ikan, kaki naga, abon ikan, bakso ikan, sei ikan, otak-otak ikan, es rumput laut, dodol rumput laut dan stik rumput laut. Upaya lainnya yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate dengan pemberian bantuan sarana prasarana rantai dingin dan safari GEMARIKAN yang dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sekaligus mendukung penanggulangan stunting di daerah tersebut.

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Program (output) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Tahun 2023		Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
Sasaran: Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil							
1	Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola	%	103,78	100	103,84	100	103,84
Sasaran: Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya							
2	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	3,90	7	-59,50**	7	-59,50**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Tahun 2023		Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
3	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	1,39	20	10,35**	20	10,35**
Sasaran: Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing							
4	Penurunan kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported)	%	18,18	0	28,12	0	28,12
Sasaran: Meningkatnya angka konsumsi ikan							
5	Persentase peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	5,62	8	0**	8	0**

Keterangan: ** Data Sementara

Penjelasan pencapaian program/kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil

- a. Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.347.567.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.140.421.260,- atau 93,81%.

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT

Maksud kegiatan penyusunan materi teknis ruang pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan bagi pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengembangan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan tujuan penyusunan materi teknis ruang pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Mendeskripsikan kebijakan dan strategi penataan ruang pesisir, struktur ruang, pola ruang, alur migrasi biota laut dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Besaran pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 457.965.900,- dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini melibatkan Kelompok kerja penyusunan Materi Teknis RZWP3K NTT pada semua instansi, diantaranya: BKKPN, BBKSDA, BPSPL Denpasar, PUPR Provinsi, Disperindag Provinsi,

Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Bappelitbangda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ESDM, Dinas Perhubungan, Disparekraf, LHK, WWF, YKAN. Kegiatan ini menghasilkan keluaran adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir Tingkat Daerah, Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir TK Pusat dengan hasil akhir tersedianya Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses integrasi RZWP3K dengan RT RW Provinsi NTT. Saat ini progress penyusunan RZWP3K telah memasuki fase penyelarasan/pengintegrasian Muatan Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir dalam Dokumen Final RZWP3K Provinsi NTT tahun 2023-2043 ke dalam RTRW Provinsi NTT.

- Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

 Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 399.800.000,- atau realisasi 99,97%. Output kegiatan ini adalah dokumen rancangan desain pembangunan/rehabilitas saluran irigasi dan/atau jalan akses di SEGAR, dokumen reviu Rencana Induk dan peta jalan sentra Ekonomi Garam (SEGAR) dan Peta jalan (roadmap) 2022-2024 yang telah disesuaikan/diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022.

 Rekomendasi kebijakan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Persetujuan dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan terhadap pemanfaatan ruang laut yang belum memiliki KKPRL, Kesesuaian terhadap rencana bangun kegiatan pelaku usaha, rencana kegiatan baru, yang mana menjadi bahan pertimbangan dalam proses KKPRL. Pagu anggaran sebesar Rp. 172.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 172.500.000,- atau 100% dan output laporan identifikasi pemanfaatan ruang laut. Selama Kurun waktu 2023 jumlah permintaan informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) terdapat 23 (dua puluh tiga) yang berupa arahan dan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut.

 Layanan Data dan Informasi

Dalam rangka penguatan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang satu data Kelautan dan Perikanan, maka dilaksanakan koordinasi antara pusat dan daerah dalam bentuk validasi data produk kelautan dan perikanan bidang pengelolaan ruang laut untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses. Pagu anggaran sebesar Rp 82.704.000,- dengan realisasi sebesar Rp 80.004.000,- atau 96,74% dengan Output tersedianya laporan hasil verifikasi dan validasi data Daerah, Provinsi dan Nasional.



Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 71.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.600.000,- atau 100%.

Kegiatan strategis yang terdapat dalam program ini, meliputi:

- Pengembangan kawasan konservasi KKD Flores Timur dan KKD Lembata
Tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadikan 2 kawasan konservasi ini lokasi prioritas bagi fokus pembangunan dan pengembangan kelautan. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023, 2 kawasan konservasi ini mendapatkan alokasi berupa:
 -  Pengadaan sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi yang merupakan tempat untuk memberikan informasi tentang kawasan konservasi. Pusat informasi dilengkapi juga dengan papan informasi. Pusat informasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu menjadi tempat untuk memberikan informasi tentang kawasan konservasi dan dapat juga difungsikan sebagai kantor lapang untuk kegiatan pengelolaan sehari-hari di lapangan.
 -  Sarana monitoring biofisik target konservasi adalah sarana yang digunakan untuk memantau habitat dan keanekaragaman hayati didalamnya. Sarana monitoring dimaksud baik yang digunakan di atas dan bawah permukaan air maupun di wilayah daratannya. Lebih jauh lagi, sarana tersebut berupa peralatan selam yang terdiri dari masker, snorkel dan fin serta sistem navigasi berbasis satelit yaitu Global Positioning System (GPS), kamera bawah air, alat

tulis bawah air, drone, ATV dan kompresor. Sarana ini bertujuan untuk digunakan dalam memantau kondisi target konservasi yang dapat berupa terumbu karang, padang lamun, mangrove, biota laut dilindungi dan/atau terancam punah lainnya.

- 🚤 Speedboat monitoring sumber daya kawasan konservasi yang merupakan kapal yang digunakan oleh SUOP kawasan konservasi untuk pelaksanaan monitoring target konservasi dan sumber daya sekaligus kapal kerja SUOP di kawasan konservasi.

2. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.335.071.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.330.152.800,- atau 95,87% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 Mil dengan pagu sebesar Rp. 202.151.000,- dan terealisasi sebesar Rp 98.516.400,- atau 48,73% dengan kegiatan sebagai berikut:

- 🚤 Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap

Kegiatan ini yang dipergunakan untuk operasional PPP Tenau dan PPI Oeba, sisa anggaran tidak terpakai karena telah mengalami refocusing anggaran. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional kepelabuhanan di intalasi (PPI Oeba dan PPP Tenau). Selama Tahun 2023 frekuensi kunjungan armada penangkapan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang adalah sebanyak 2.615 kali terdiri dari kapal dengan ukuran 1-30 GT. Kegiatan pendaratan ikan pada periode Bulan Januari-Desember 2023 adalah sebesar Rp. 803.385,5 Kg sedangkan untuk penyaluran BBM sebanyak 417.300 liter. Pelayanan surat perijinan (SPB) sementara sebanyak 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) yang meliputi: Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) sebanyak 52 (lima puluh dua) surat, Surat Keterangan Pelabuhan Pangkalan (SKPP) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) surat, Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) sebanyak 1.761 (seribu tujuh ratus enam puluh satu) surat dan rekomendasi BBM sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) surat. Sedangkan pada PPP Tenau frekuensi kunjungan armada penangkapan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang adalah sebanyak 2.049

kali terdiri dari kapal dengan ukuran 1-30 GT. Kegiatan pendaratan ikan pada periode Bulan Januari-Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.146.111 Kg sedangkan untuk penyaluran BBM sebanyak 6.886.472 liter.



Operasional Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap, yang meliputi:

Penerbitan Rekomendasi antara lain: SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) dan Izin yang terdiri dari STPI (Surat Tanda Penangkapan Ikan). Output kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) yang terdiri dari 559 (lima ratus lima puluh sembilan) rekomendasi izin dan 1.106 (seribu seratus enam) izin. Adapun uraian rekomendasi izin dan izin dapat diuraikan sebagai berikut:

- SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) rekomendasi izin;
- SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak 466 (empat ratus empat puluh enam) rekomendasi izin;
- SIKPI (Surat izin Kapal Pengangkut Ikan) sebanyak 19 (sembilan belas) rekomendasi izin;
- STPI (Surat Tanda Penangkapan Ikan) ANDON (kapal dari luar daerah NTT yang datang mencari ikan di daerah NTT) sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Izin;
- Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Lokal sebanyak 1.009 (seribu sembilan) rekomendasi izin.



Penerbitan Tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.130.000,- atau terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau sebesar 38,98% dengan kegiatan Penerbitan Rekomendasi antara lain Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Lokal sebanyak 1.009 (seribu sembilan) Izin. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.

- Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Tangkap juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

 Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan (2337)

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 32.125.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini berupa Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran < 5 GT dan 5-30 GT yang belum memiliki identitas teridentifikasi yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendaftaran kapal perikanan berukuran <5 GT-30 GT yang belum memiliki identitas untuk kegiatan penangkapan ikan (kapal baru/yang belum memiliki identitas terindikasi untuk melakukan penangkapan ikan di Fishing Ground).

 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (2339), kegiatan ini meliputi:

- **Identifikasi Calon Penerima Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT) Nelayan**

Pagu anggaran sebesar Rp. 62.650.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya identifikasi calon penerima sertifikat hak atas tanah nelayan (SEHAT) Nelayan di 3 kabupaten/kota dengan hasil identifikasi sebanyak 300 peserta dengan rincian pada Kabupaten Kupang sebanyak 100 peserta, Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 100 peserta dan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 100 peserta.

- **Sosialisasi Perizinan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap**

Pagu anggaran sebesar Rp. 23.930.000,- dengan output terlaksananya penerbitan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Pengangkutan ikan di Bidang Penangkapan Ikan. Dengan sasaran masyarakat Nelayan dan Pelaku Usaha yang belum memiliki ijin/perpanjangan izin penangkapan ikan sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan di Fishing Ground.

- **Pelatihan SIMKADA Petugas Kab/Kota**

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.729.000 dengan output terbitnya Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perjinan

Berusaha Usaha Subsektor Pengangkutan ikan di Bidang Penangkapan Ikan melalui Aplikasi SIMKADA di 7 (tujuh) cabang dinas kegiatan ini dilakukan di Kota Kupang.

- Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya
Pagu anggaran sebesar Rp. 4.372.000,- dengan output terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang berbadan Hukum di Kab/Kota kegiatan ini dilaksanakan di Kota Kupang

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (2341)

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 8.763.000,- yang dilaksanakan di Kota Kupang dengan sasaran dari kegiatan ini nahkoda kapal dan awak kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Fishing Ground. Output dari kegiatan ini adalah terdatanya hasil tangkapan ikan (Log Book) dan posisi kapal dalam melakukan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

- Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 345.700.000,- dengan sasaran dari kegiatan ini adalah 88 petugas validator di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Pendataan perikanan tangkap di Tahun Anggaran 2023 diinput pada aplikasi Satu Data Pusdatin Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah petugas statistik (yang meliputi: validator dan enumerator) di semua Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan ini adalah terdatanya Statistik Perikanan tangkap meliputi data produksi perikanan tangkap untuk tiap jenis ikan, jumlah alat tangkap dan jumlah nelayan untuk tahunan 2023.

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (2342)

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 82.112.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya Rencana Penganggaran Anggaran Tahun 2024 dan tersusunnya Administrasi Keuangan Bidang Perikanan Tangkap.

Kegiatan strategis yang terdapat dalam program ini, meliputi:

- Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pada Tahun 2023 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT mendapatkan anggaran sebesar Rp 23.980.090.000,- khusus untuk fokus pembangunan sarana prasarana pelabuhan perikanan yang terbagi ke 2 lokasi prioritas yaitu PP Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan PP Tulandale di Kabupaten Rote Ndao. Kedua pelabuhan ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui Berita Acara Serah Terima Tanah dan Dokumen Lahan PPI Nomor: PEM/OTDA.590/2.837/XII/2019 dan Nomor: PEM.118.2/I/465/XII/2019 bagi PP Waingapu serta Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana dan Dokumen PPI Nomor: 590/1098c/BKA5.3 dan Nomor: Pem.137/I/373a/XI/2021 bagi PP Tulandale. Terdapat 5 paket pekerjaan yang mendukung pembangunan pelabuhan perikanan, antara lain:

 Penahan gelombang (breakwater) PP Waingapu

Penahan gelombang merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk meredam energi gelombang di belakang struktur dan pengurangan transport sedimen tegak lurus pantai, menurunkan tinggi gelombang di pantai dan memperlambat angkutan sedimen ke arah pemecah gelombang antara lain berupa bulkhead dan struktur ambang rendah. Dengan pagu senilai Rp 7.500.000.000,- dan nilai kontrak Rp 7.211.154.000,00, pekerjaan ini terealisasi 100% dan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

 Dermaga PP Waingapu

Dermaga merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang atau barang. Pada Tahun 2023, PP Waingapu mendapatkan alokasi pagu senilai Rp 6.120.000.000,- dengan nilai kontrak senilai Rp 5.990.845.000,- dan terealisasi 100%.

 Dermaga PP Tulandale

Pada Tahun 2023, PP Tulandale mendapatkan alokasi pagu senilai Rp 4.860.000.000,- dengan nilai kontrak senilai Rp 4.837.200.000,- dan terealisasi 100%.

 Kolam Pelabuhan PP Tulandale

Kolam pelabuhan merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak Kapal Perikanan. PP Tulandale

mendapatkan alokasi pagu senilai Rp 5.300.100.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.824.300.000,- dan terealisasi 100%.

 Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur PP Tulandale

Peralatan dan mesin tersebut terdiri atas:

- internet untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kegiatan pendaratan ikan termasuk rencana penerapan PNBP pasca produksi di pelabuhan perikanan serta pendataan pada aplikasi e-logbook.
- CCTV di area dermaga/ kawasan pelabuhan digunakan untuk adanya pemantauan aktifitas pembongkaran dan penimbangan ikan di dermaga pelabuhan perikanan atau kegiatan lainnya.
- Troli akan meningkatkan efisiensi waktu untuk proses pengangkutan ikan di kawasan pelabuhan perikanan.
- Keranjang ikan dibutuhkan sebagai wadah untuk menjaga sanitasi dan mutu ikan selama proses di pelabuhan perikanan.

Dengan nilai pagu senilai Rp 200.500.000,- dan nilai kontrak senilai Rp 199.900.000,- serta terealisasi 100%.

b. Program Perikanan Budidaya

Program Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.989.624.019,- dan mengalami refocusing menjadi Rp. 1.832.158.199,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.665.646.350,- atau 90,91%. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- **Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut**

Kegiatan ini didukung pagu sebesar Rp. 1.715.000.000,-, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.624.050.000,- atau sebesar 93,95%. Kegiatan ini meliputi: penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul, Rehabilitasi Bak Bulat, Rehabilitasi Bak/Gedung Hatchery, Rehabilitasi Bak Pemijahan, Rehabilitasi Gedung Kultur Jaringan, Rehabilitasi Gedung Pakan, Instalasi Sarana Penunjang Bak Udang, Pompa Submersible Air Laut dan Instalasi, Instalasi Blower Bak Udang, Konstruksi Sarana dan Prasarana Biosecurity (DAK) dengan lokasi kegiatan ini ada di instalasi BBIP Tablolong. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut.

- **Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air tawar yang penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan Oleh daerah Provinsi dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas daerah Kabupaten/ Kota**

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 98.428.050,- realisasi sebesar Rp 41.596.350,- atau 42,46% dengan sasaran unit perbenihan dan tambak di Kabupaten Kupang (BBIS Noekele) dan Kota Kupang (Tambak Oesapa). Beberapa item dalam kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran telah direfocusing. Output dari kegiatan ini adalah terkelolanya pembenihan air tawar di BBIS Noekele Kabupaten Kupang.

- Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Budidaya (PB) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

 Sampel Monitoring Penyakit Ikan Yang diuji

Pelaksanaan monitoring penyakit ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan Bab III bagian Kesatu bertujuan untuk pengambilan dan pengujian sampel ikan, serta pengumpulan data dan informasi dilapangan untuk monitoring aktif.

Monitoring penyakit ikan merupakan salah satu kegiatan pengendalian penyakit ikan yang outputnya dapat digunakan dalam upaya pengendalian penyakit ikan baik pada level usaha, Kawasan/sentra budidaya, administrative pemerintah (antar daerah), dalam suatu Negara, ataupun perdagangan produk perikanan antar negara. Monitoring penyakit ikan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan komoditas yang menjadi target dalam pelaksanaan monitoring adalah komoditas utama, sedangkan target penyakit ikan merupakan penyakit ikan penting yang mengacu pada KEPMEN-KP 28 Tahun 2023 tentang Jenis Penyakit Ikan yang berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan. Pengujian sampel ikan yang telah diambil dilakukan di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendali Mutu Kupang. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 24.295.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 100% yang berlokasi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kab Timor Tengah Selatan dengan sasaran unit pembenihan dan pembudidaya ikan dengan output terlaksananya kegiatan pantauan terhadap penyakit ikan Pada kelompok masyarakat.

 Kegiatan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)

Kegiatan ini didukung Pagu anggaran sebesar Rp. 314.000.000,- dan terealisasi sebesar 100%. Tuntutan permintaan Negara Buyer terhadap kebutuhan pangan khususnya produk hasil perikanan budidaya semakin

meningkat dari tahun ke tahun dan hal ini juga diikuti dengan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi produsen. Peningkatan kualitas daya saing produk sektor kelautan dan perikanan budidaya di Indonesia dilakukan melalui penerapan standar dan sertifikasi CBIB yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk budidaya dalam hal jaminan keamanan pangan dan kualitas, serta perwujudan perikanan budidaya yang bertanggungjawab. Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berfungsi menyiapkan unit budidaya untuk disertifikasi dalam hal pendampingan dan pembinaan juga menyiapkan dokumen permohonan sertifikasi CBIB dengan lokasi kegiatan di Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. Sabu Raijua, Kab. Rote Ndao, Kab. Sikka, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Malaka dan Kab. Sumba Tengah. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Sertifikasi CBIB sebanyak 94 unit pembudidaya.



Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 257.527.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 254.127.000,- atau 98,67% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Layanan data dan informasi
 Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilaksanakan koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam bentuk Validasi Data Bidang Perikanan Budidaya untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, meta data, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 78.439.000,- dengan output dari kegiatan ini adalah tersedianya data budidaya bidang perikanan budidaya.
- Layanan perencanaan dan penganggaran
 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian/kontrol dalam pelaksanaan setiap program/

kegiatan Ditjen Budidaya yang dilaksanakan dari rencana yang telah ditetapkan. Pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.128.000,- sedangkan output dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dirjen Budidaya.

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Sebagai pendukung kinerja pelaksanaan dari program yang dilakukan, kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memegang peran penting dalam memastikan program yang dilaksanakan tepat waktu dan sasaran. Metode pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola. Pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.160.000,- dengan output dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Monitoring Bantuan Program Pemerintah Kepada Masyarakat Pembudidaya.

- Layanan Manajemen Keuangan

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan neraca ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) E1 di setiap bulannya. Pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp.85.800.000,- dengan output terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

Kegiatan strategis di bidang Perikanan Budidaya meliputi:

- Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan

Pada Tahun 2023, terdapat alokasi penganggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bagi Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tablolong yang berada di Kabupaten Kupang. Total pagu anggaran sebesar Rp 1.715.000.000,- dengan total nilai kontrak sebesar Rp 1.708.050.000,- yang terbagi kedalam 4 pekerjaan, meliputi:

-  Rehabilitasi Kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk BBIP Tablolong

Bertujuan untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal dan penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk, paka, peralatan pembenihan) yang menunjang produksi. BBIP Tablolong mendapatkan alokasi pagu anggaran senilai Rp

840.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp 837.900.000,- dan terealisasi 100%.

✚ Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) BBIP Tablolong
Sarana pendukung penyaluran air dari sumber mata air ke masing-masing kolam/bak pemijahan. Pada Tahun 2023, BBIP Tablolong mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 588.000.000,- dengan nilai kontrak senilai Rp 586.500.000,- dan terealisasi seluruhnya.

✚ Pembangunan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana biosecurity BBIP Tablolong
Terdapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 203.000.000,- dengan nilai kontrak senilai Rp 199.650.000,- dan terealisasi 100%.

✚ Tambak Oesapa
Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan kawasan pembesaran kepiting dan lobster dikembangkan di Tambak Oesapa. Kepiting diperoleh dari tangkapan masyarakat dengan ukuran berbeda, yang kemudian dipelihara/dibesarkan dalam wadah yang disesuaikan dengan besaran tubuh dengan sistem sirkulasi air. Selain pembesaran kepiting dan lobster Lembaga Vokasi NTT juga melakukan Pengolahan Teripang. Teripang yang diperoleh biasanya dari hasil tangkapan nelayan/penyelam. Teripang yang dibawa oleh pengepul biasanya masih dalam bentuk mentah dan yang sudah diolah sesuai standar dan kesepakatan yang kemudian ditimbang serta dikelompokkan berdasarkan jenis, harga dan beratnya. Teripang yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah kemudian di keringkan/dibersihkan sesuai dengan standar untuk pengiriman. Sedangkan untuk yang masih mentah harus dilakukan proses perebusan terlebih dahulu dan selanjutnya diperlakukan sama untuk standar pengiriman.

✚ Pengembangan Budidaya Ikan di BBIS Noekele
Kegiatan di BBIS Noekele meliputi: pemijahan ikan, pendederan benih ikan, pembesaran ikan, penanganan hama penyakit, pengawasan instalasi listrik dan saluran inlet dan outlet, penjualan benih ikan (Nila, Lele, Karper dan Mas). PAD BBIS Noekele sebesar Rp 36.982.000,-.

3. Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing

a. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.314.896.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.138.930.260,- atau

92,40% dengan rincian kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil dengan kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 75.681.000,- dengan kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Rutin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali Gelar Operasi Pengawasan tahap 1 dan 2. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga terdapat 41 (empat puluh satu) kapal dengan 9 (sembilan) pelanggaran sehingga jumlah kapal yang tertib sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapal dengan rincian sebagai berikut:

🚦 Gelar operasi pertama dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu tanggal 15-18 April 2023 dengan waktu patroli 5 (lima) jam setiap hari sehingga total waktu pelaksanaan Patroli Tahap 1 adalah 32 jam. Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan selat Rote, perairan Pulau Kambing, perairan Laut Sawu, perairan Teluk Kupang, perairan Selat Semau dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) kapal perikanan dengan hasil 4 (empat) kapal perikanan yang melakukan pelanggaran yang tanpa dokumen yaitu SPB dan SLO.

🚦 Gelar operasi kedua Gelar operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahap 2 Di Perairan NTT ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu terhitung dari tanggal 9 - 12 November 2023 dengan ketentuan 8 (delapan) jam patroli setiap harinya (total waktu patroli 32 jam). Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan selat Rote, perairan Pulau Kambing, perairan Laut Sawu, perairan Teluk Kupang, perairan Selat Semau dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 25 (dua puluh lima) kapal perikanan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 5 (lima) kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut tanpa dokumen yaitu:

SPB habis masa berlaku, tanpa SPB, Sertifikat Kelayakan, Pas Besar dan TDKP Habis Masa Berlaku.

- Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang PSDKP juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

 Kegiatan Pembinaan POKMASWAS

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 72.330.000,- dengan realisasi kegiatan sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain:

- Pembinaan POKMASWAS

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yaitu di Kabupaten Sabu raijua, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Flores Timur dan Kota Kupang. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan POKMASWAS sejumlah 12 (dua belas) orang.

- Konsolidasi POKMASWAS

Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Kupang. Fungsi dan peran dari POKMASWAS adalah membantu pengawasan perairan di daerahnya, Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan di 3 (tiga) kabupaten.

 Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan pengawasan perikanan

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000,- dengan realisasi kegiatan sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari:

- Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 23 Agustus-26 Agustus 2023 dengan kegiatan koordinasi/benchmarking perencanaan pengawasan dengan output terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran satker 05.

- Sosialisasi Pengawasan Perizinan berbasis risiko lingkup Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 9 Oktober 2023 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dihadiri oleh tim pengawas dari 7 (tujuh) cabang dinas dan satker pusat. Adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi

pengawasan perijinan berbasis resiko Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Koordinasi Pengawasan Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk berkoordinasi dengan tim pengawasan UPT dari tingkat daerah (Kabupaten/Kota) sampai dengan pusat. Kegiatan pengawasan konsultasi ke pusat dilaksanakan pada hari Tanggal 23-26 Agustus 2023 dengan output terlaksananya koordinasi pengawasan perikanan di pusat. Sedangkan Koordinasi Pengawasan UPT di Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari Tanggal 19-21 Juli 2023 dengan output terlaksananya koordinasi pengawasan perikanan di Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Flores Timur.

- Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan perikanan.

 Layanan umum, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 111.152.000,- dengan output terselenggaranya kegiatan administrasi layanan umum output terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi perencanaan dan penganggaran serta finalisasi kegiatan lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan strategis bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi:

- Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi pagu anggaran senilai Rp 2.020.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.970.057.000,- yang terbagi kedalam 3 paket pekerjaan, meliputi:

- Perlengkapan POKMASWAS di 6 Kabupaten

Merupakan peralatan dan sumber daya pendukung lainnya yang digunakan POKMASWAS untuk membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya. Tahun 2023 terdapat 6 Kabupaten yang menjadi fokus yaitu Sulamu (Kabupaten Kupang), Kotoolin (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Boking (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Alor Barat Laut

(Kabupaten Alor), Solor Barat (Kabupaten Flores Timur) dan Alak (Kota Kupang). Jenis perlengkapan POKMASWAS terdiri dari rompi (life jacket), Headlamp (5 unit), Handy Talky, Kamera Sempiro, GPS, Teropong Binocular, Teropong Monocular dan Papan Nama Pengawas.

Merupakan kapal pemerintah yang memiliki ruang-ruang terbatas dan diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Kapal pengawas berukuran 8 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.560.307.000,- diberi nama KP. Napoleon 03 yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayah perairan Timor dan sekitarnya.

 Perlengkapan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K)

Merupakan seperangkat perlengkapan Pengawas Perikanan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan perikanan. Perlengkapan pengawasan perikanan meliputi:

- Pakaian Dinas Lapangan Pengawas Perikanan
- Kamera digital

4. Meningkatnya angka konsumsi ikan

a. Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.838.158,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 49,24% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100% yang dilaksanakan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya audit Internal dan External ISO 9001:2015 sehingga setiap kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berdasarkan Standar ISO 9001:2015 dan Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar ISO 9001:2015 pada Dinas kelautan dan perikanan Provinsi NTT.
- Promosi olahan produk perikanan yang dilakukan oleh bidang P3KP yang merupakan salah satu bentuk kampanye Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan dengan tujuan kampanye Gerakan memasyarakatkan adalah meningkatkan angka Konsumsi Ikan.
- Rekomendasi Perijinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan PERDA nomor 3 Tahun 2011 tentang

Pengendalian Usaha Perikanan maka fungsi pengendalian, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan dalam usaha perikanan telah diatur sesuai dengan kewenangan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia yang berada pada 4 mil hingga 12 mil laut, sedangkan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kurang dari 4 mil. Disamping itu bagi kabupaten/kota yang memiliki Unit Pengolahan Ikan yang belum memiliki izin agar dapat segera mengurus izin tersebut. Melihat kenyataan yang ada maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan melayani Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) bagi Pembeli, Penampungan, Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan dan selanjutnya melakukan Pembinaan dan Monitoring di kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan mengeluarkan rekomendasi SIUP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Penerbitan Rekomendasi SIUP sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) rekomendasi dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP sebanyak 60 (enam puluh) izin.

- Hari Ikan Nasional (Harkanas) merupakan salah satu media dalam mengkampanyekan Makan Ikan kepada masyarakat umum. Kegiatan ini digunakan untuk mendukung rangkaian kegiatan pada Puncak Hari Ikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 21 November. Selain memiliki kandungan gizi yang lengkap, ikan memiliki peran penting bagi ibu hamil, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), perkembangan otak anak-anak dibawah usia dua tahun (Baduta), usia remaja serta lanjut usia. Ikan sebagai sumber bahan pangan sehat juga berperan mengurangi beban penyakit sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk tahun 2023 kegiatan HARKANAS pada tanggal 21 November 2023 di Jakarta yang diikuti oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, sedangkan kegiatan HARKANAS di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuka oleh Bapak Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini melibatkan Anak TK dan SD. Pada kegiatan HARKANAS di Provinsi NTT ini digelar Pasar Murah dan Lomba Mewarnai Ikan, Lomba Tangkap Ikan Nila untuk anak TK dan SD serta penyajian menu serba ikan. Pameran produk serba ikan oleh UMKM Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengolahan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:



Layanan Dukungan Manajemen Internal

- Satu Data KP bidang PDSPKP tahun 2023

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengambilan data sampel di lapangan melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha bidang PDSPKP dengan menggunakan panduan kuesioner yang sudah ditentukan. Data hasil wawancara dimaksud, kemudian dientri dalam aplikasi Satu Data KP. Data yang dikumpulkan meliputi data profil dan produksi pelaku usaha, yang terdiri dari UPI, UPPN/UPHPN, Pelaku Usaha Coldstorage dan data lainnya. Pengumpulan dan entri data sampel dilaksanakan mulai tanggal 01 – 15 setiap bulan. Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp.229.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.443.902 atau sebesar 48,59%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya layanan data statistik perikanan ditjen penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

- Perhitungan Indeks Kinerja Logistik (IKLI)

Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dengan tujuan membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan hasil perikanan yang terintegrasi, efektif dan efisien untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi system produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Untuk mendalami performa dari sistem logistik ikan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Desain instrumen pengukuran kinerja menjadi tahapan awal yang harus dikembangkan dalam pengukuran kinerja yang dinyatakan sebagai indeks, sehingga perlu dilakukan pengukuran kinerja indeks logistik hasil perikanan. Berdasarkan perhitungan IKLI TA. 2023 diperoleh nilai hasil semester 1 sebesar 72,00 dan untuk nilai IKLI semester 2 Tahun 2023 sebesar 74,61, sedangkan untuk perhitungan IKLI dengan nilai koridor Kupang-Surabaya/Jakarta diperoleh nilai hasil semester 1 sebesar 69,82 dan untuk nilai IKLI semester 2 Tahun 2023 sebesar 71,87.

- Pengolahan dan Pembinaan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
 Sertifikat Kelayakan Produk merupakan salah satu bentuk dari penerapan standar produk perikanan terhadap aspek GMP dan SSOP di Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil. Hal ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan mempunyai penampilan dan mutu yang baik dan terjamin keamanannya pada saat dikonsumsi dalam rangka memenuhi tuntutan pasar domestik dan pasar internasional. SKP diterbitkan atas dasar hasil pembinaan yang dilakukan sepenuhnya oleh pembina mutu yang bertugas di Dinas Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan yang berperan sebagai penanggung jawab terhadap penerapan GMP dan SSOP di UPI di wilayah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan SKP dan pembinaan UPI di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Flores Timur. Kegiatan SKP ini awal rencana pelaksanaan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 124.250.000,- dengan Target Rekomendasi SKP pada kegiatan ini sebanyak 39 industri. Kegiatan SKP ini dilakukan oleh Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yang mana tidak ada anggaran untuk kegiatan dimaksud baik anggaran APBD maupun anggaran APBN. Untuk anggaran APBN tidak ada karena adanya revisi anggaran sehingga ada kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana Dekonsentrasi kegiatannya kembali ke Pusat. Walaupun tanpa dana kegiatan ini tetap berlangsung dalam tahun 2023.

Capaian kegiatan ini yaitu Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) oleh Daerah. Pelayanan dan pembinaan SKP telah dilakukan penerbitan SKP dan dalam proses penerbitan totalnya sebanyak 60 (enam puluh) SKP.

- Kegiatan SAFARI GEMARIKAN
 Target Gemarikan merupakan target stunting yaitu wanita usia subur, remaja putri produktif, bayi usia 0-2 tahun, ibu hamil dan seluruh target yang terlibat dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Kegiatan Gemarikan pada tahun 2023 yang dilaksanakan secara Dekonsentrasi

di 34 Provinsi dengan alokasi 1 Kabupaten/Kota per provinsi. Kegiatan berupa edukasi manfaat ikan bagi Kesehatan, pemberian bubur ikan, pemeriksaan Kesehatan ibu dan anak, penimbangan balita/baduta dan pemberian paket Gemarikan (isi olahan ikan. Lokasi pelaksanaan kegiatan Safari Gemarikan ditentukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas nasional penanganan stunting dan penentuan nya ditetapkan berdasarkan SK Kepala Bappenas No.KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023. Dalam rangka promosi peningkatan konsumsi ikan untuk mendukung program penanganan stunting dan gizi buruk, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bersama mitra Komisi IV DPR RI melaksanakan kegiatan Gemarikan. Lokasi target intervensi stunting tahun 2023 yaitu salah satunya Provinsi NTT tepatnya di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu. Perluasan Safari Gemarikan yg dilaksanakan oleh KKP bersama Anggota DPR RI Komisi IV telah mendengar usulan dari UMKM Pengolahan Ikan yg salah satu usulan Bimtek dan Penguatan usaha berupa Peralatan Pengolahan Ikan di Nusa Tenggara Timur.

Paket pengolahan ikan berupa Paket Peralatan Bakso Ikan, Krupuk Ikan, Ikan Asap dan Peralatan Pengolahan Bernilai tambah untuk Poklashar Nelayan Bersatu, Muzijah Paket Kerupuk Ikan, Paket Pengolahan Bakso Ikan Kepada Ikan Terbang, Solagratia Paket Penyerahan Peralatan Bernilai Tambah, sebelum dilakukan penyerahan bantuan tersebut ada sambutan penyerahan bantuan oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang dan anggota DPR RI Komisi IV yang membidangi Kelautan dan Perikanan an. Ansilema dan didampingi oleh salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang P3KP an. Yohanis Pandie sebagai salah satu Tim Teknis Penyerahan Bantuan KKP RI dan penyerahan bantuan 4 (empat) Unit Chest Freezer kepada Poklashar Sehati kota kupang, Mawar Kota kupang, Usaha Mandiri dan Nunnapa Kabupaten TTU.

Adanya promosi GEMARIKAN pada Acara Mengikuti kegiatan Pameran Hari Nusantara di Lantamal Bolok, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan memfasilitasi UMKM kota kupang dan khususnya siswa-siswi SMK Negeri Oehani Jurusan Agribisnis Pengolahan Ikan mempromosikan olahan produk perikanan berupa Bakso Ikan siap saji, Es buah rumput laut, dan Abon ikan.

- **Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan**
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi perikanan yang besar sehingga perlu dikelola secara optimal. Pelaku usaha binaan kami bergerak di bidang Budidaya, Nelayan Tangkap, Pemasaran serta Pengolahan Garam. Pelaku usaha perikanan memiliki pengetahuan yang sangat minim terkait akses permodalan dan manajemen pengelolaan keuangan. Salah satu Tugas pendamping usaha adalah dengan membantu pelaku usaha dalam mendapatkan modal dengan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang baik untuk akses permodalan. Melalui bimbingan dan sosialisasi dari Kami Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) dan kolaborasi yang baik dengan tenaga penyuluh sehingga bantuan permodalan sudah dapat dirasakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha dari berbagai sektor usaha perikanan seperti Pengolahan Garam, Pemasar hasil perikanan dan Nelayan Tangkap yang telah melakukan pinjaman.
- **Data Angka Konsumsi Ikan Tahun 2023**
Penghitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) selama ini dilakukan dalam periode tahunan berdasarkan raw data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Kegiatan Penghitungan AKI dilakukan di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba Barat. Untuk perhitungan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2023 akan melaksanakan penghitungan pada tahun 2024 menunggu informasi kegiatan finalisasi penghitungan AKI 2023 dari Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI. Diharapkan agar melalui kegiatan Survey dan Pengkajian Angka Konsumsi Ikan (AKI)

diperolehnya data yang valid sehingga menjadi acuan untuk menyusun program kerja yang mampu mendorong segenap lapisan masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengkonsumsi ikan, sehingga makan ikan menjadi budaya bangsa. Finalisasi AKI 2022 untuk Provinsi NTT Angka Konsumsi Ikan sebesar 55,61 kg/perkapita/tahun.

3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Anggaran

Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami beberapa kali refocusing yang berdampak pada efisiensi anggaran program/ kegiatan pada tahun 2023. Efisiensi anggaran secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja dari program/ kegiatan yang mendukung IKU. Penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung melalui APBD sebesar Rp. 53.059.859.128,- dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp 51.579.537.247,- realisasi keuangan TA. 2023 sebesar Rp 46.523.985.726,- mencapai 90,20%. **Terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 5.055.551.521,- atau 9,80% dari total alokasi APBD yang tidak dapat terserap.**

b. Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, Cabang Dinas dan seluruh instalasi dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Waktu Pelaksanaan

Capaian kinerja cukup terhambat dikarenakan refocusing dan dampak situasi pandemic Covid-19 yang belum seutuhnya pulih. Sebagian besar kegiatan baru dipacu pada Triwulan IV untuk mencapai target kinerja.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana serta operasional penunjang pada Cabang Dinas untuk menjangkau lokus dan titik-titik sentra kelautan dan perikanan juga berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dengan berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja. Penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung melalui APBD sebesar Rp. 53.059.859.128,- dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp 51.579.537.247,- realisasi keuangan TA. 2023 sebesar Rp 46.523.985.726,- mencapai 90,20%. Pagu ini untuk membiayai 6 (enam) Program dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

Tabel 3.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan <i>Refocusing</i>	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.137.831.151	19.628.009.270	16.288.835.056	82,98	100
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.484.479.325	1.484.479.325	1.028.330.059	69,27	100
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.374.256.651	12.315.237.500	10.292.462.222	83,57	100
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.012.825	15.012.825	11.616.025	77,37	100
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.986.270	275.240.270	69.537.400	25,26	100
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.913.830	216.249.400	855.000	0,39	100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.398.638.150	4.935.245.850	4.702.617.449	95,29	100
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.544.100	386.544.100	183.414.901	47,44	100
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.975.098.000	3.347.563.900	3.140.421.260	93,81	100
1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.971.698.000	3.344.163.900	3.140.421.260	93,90	100

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil diLuar Minyak dan Gas Bumi	3.400.000	3.400.000	-	0	0
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	25.520.571.000	24.335.071.000	23.230.152.800	95,45	100
1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1.387.651.000	202.151.000	98.516.400	48,73	100
1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000	10.890.000	3.602.400	33,07	100
1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.130.000	5.130.000	2.000.000	38,98	100
1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	24.116.900.000	24.116.900.000	23.126.034.000	95,89	100
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.989.624.019	1.832.158.119	1.665.646.350	90,91	100
1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	5.130.069	5.130.069	-	0	0
1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.984.493.950	1.827.028.050	1.665.646.350	91,17	100
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.314.896.800	2.314.896.800	2.138.930.260	92,40	100
1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.314.896.800	2.314.896.800	2.138.930.260	92,40	100
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	121.838.158	121.838.158	60.000.000	49,24	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158	121.838.158	60.000.000	49,24	100

3.2.2. Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 23.000.000.000 dan mengalami revisi menjadi Rp. 10.000.000.000. Realisasi Per 31 Desember Tahun 2023 mencapai 76,12% atau Rp. 7.611.509.196,- dengan rincian pendapatan sebagaimana dibawah ini:

Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Target (Rp)	Realisasi	%
	Penerimaan Awal	Penerimaan Perubahan		
1	2	3	4	5
A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	935.225.000	1.305.225.000	1.812.851.605	138,89
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	935.225.000	1,305,225,000	1.812.851.605	138,89
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir	162.000.000	162,000,000	198.312.000	122,41
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.000.000.000	1,000,000,000	740.968.531	74,10
B. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	20.902.775.000	7.532.775.000	4.859.377.060	64,51
1. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	20.902.775.000	7.532.775.000	4.859.377.060	64,51
JUMLAH	23.000.000.000	10.000.000.000	7.611.509.196	76,12

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan triwulan berikutnya, juga dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2023 sebesar **Rp 53.059.859.128,- (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembila Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp 51.579.537.247,- dengan realisasi keuangan TA. 2023 sebesar Rp 46.523.985.726,- (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau mencapai persentase 90,20%. Secara umum capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 berkategori baik yang terdiri dari 6 indikator sasaran strategis dan 5 indikator kinerja utama yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 5 indikator capaian kinerja sasaran strategis yang melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 1 indikator capaian kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target;
2. Terdapat 2 indikator capaian kinerja utama yang melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 3 indikator capaian kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target.

Indikator capaian kinerja sasaran strategis yang masih perlu ditingkatkan capaiannya yaitu:

1. Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah

Sedangkan capaian kinerja utama yang masih perlu ditingkatkan capaiannya yaitu:

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
3. Penurunan Kasus IUU Fishing (*Illegal, Unregulation, Unreport Fishing*)

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui fokus dan prioritas program serta pemerataan antar wilayah di Nusa Tenggara Timur, meliputi:

1. Peningkatan pemberdayaan/ bantuan pemerintah bagi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk hasil perikanan;
2. Perluasan akses pasar, promosi, investasi maupun permodalan usaha untuk nelayan/ pembudidaya/ pengolah/ pemasar;
3. Meningkatkan pembinaan POKMASWAS yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota serta bantuan sarana dan prasarana pengawasan bagi POKMASWAS;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.

Akhirnya pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dan cita-cita walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu kerja keras untuk dibenahi.